

STRATEGI PENGEMBANGAN SDM DALAM PENGGUNAAN APLIKASI SIMPeL PADA PROSES PENGADAAN DI KEMENTERIAN KEUANGAN : STUDI KASUS PADA CV BINTANG LIMA

Raufal Damar Harenda¹, Arfiani Yulianti Fiyul²

^{1,2} Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang Program Studi Magister Manajemen,
Indonesia

Email : 24070300198@students.unis.ac.id, arfiani.yulianti@unis.ac.id

ABSTRAK

Transformasi digital dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah mendorong efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas birokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang diterapkan oleh CV Bintang Lima, sebuah UMKM penyedia layanan pengadaan, dalam merespons implementasi aplikasi Sistem Informasi Pengadaan Langsung Elektronik (SIMPeL) oleh Kementerian Keuangan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus, melalui wawancara mendalam dan analisis model Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adaptasi dilakukan melalui pembagian peran antar generasi, pembelajaran praktik langsung, serta komunikasi kolaboratif internal. Kesimpulannya, strategi pengembangan SDM yang fleksibel dan kontekstual mampu meningkatkan efektivitas kerja dan mendukung prinsip good governance. Studi ini merekomendasikan peningkatan literasi digital dan kesiapan SDM UMKM dalam menghadapi digitalisasi birokrasi.

Kata Kunci : Digitalisasi, Pengadaan Pemerintah, UMKM

ABSTRACT

Digital transformation in government procurement aims to enhance efficiency, transparency, and accountability in public administration. This study examines human resource development (HRD) strategies implemented by CV Bintang Lima, a micro, small, and medium enterprise (MSME) supplier, in response to the implementation of the Electronic Direct Procurement Information System (SIMPeL) by the Ministry of Finance. A qualitative case study approach was employed, with data collected through in-depth interviews and analyzed using the Miles, Huberman, and Saldana model. The findings reveal that adaptation occurred through generational role distribution, hands-on learning, and collaborative internal communication. The study concludes that flexible and contextual HRD strategies improve work effectiveness and support good governance principles. It recommends enhancing digital literacy and HR readiness among MSMEs to navigate the digital bureaucracy era. .

Keywords: digitalization, government procurement, UMKM

Article history

Received: Juli 2025

Reviewed: Juli 2025

Published: Juli 2025

Plagiarism checker no 886

Doi : prefix doi :

10.8734/musytari.v1i2.359

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah menjadi salah satu fokus utama dalam peningkatan efisiensi birokrasi dan pelayanan publik di Indonesia. (Humairo Amriza & Suhartati, 2022) Salah satu implementasi dari transformasi ini adalah digitalisasi proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, yang kini dilakukan secara daring melalui berbagai platform elektronik, salah satunya adalah aplikasi Sistem Informasi Pengadaan Langsung Elektronik atau Simpel yang digunakan oleh Kementerian Keuangan. Aplikasi ini bertujuan untuk menciptakan proses pengadaan yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel, sekaligus mendorong partisipasi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai penyedia barang dan jasa pemerintah. Namun, di balik pemanfaatan teknologi ini, terdapat tantangan tersendiri, khususnya bagi pelaku UMKM yang masih dalam proses adaptasi terhadap sistem digital. Proses transformasi digital tidak hanya menuntut adanya infrastruktur teknologi yang memadai, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang menjalankannya. Pengembangan kompetensi SDM menjadi kunci agar proses pengadaan digital tidak hanya sekadar formalitas administratif, melainkan benar-benar memberikan manfaat dalam jangka panjang bagi penyedia jasa dan pemerintah.

Penggunaan aplikasi SIMPeL ini merepresentasikan langkah strategis dalam mengadopsi kebijakan digitalisasi yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Aplikasi ini tidak hanya mempermudah proses administratif dalam pengadaan barang dan jasa, tetapi juga menjadi instrumen transformasi birokrasi menuju sistem yang lebih efisien, transparan, dan terintegrasi secara digital. (PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 2021) Penggunaan aplikasi ini bukan sekadar soal mengganti proses manual menjadi digital. Lebih jauh, sistem ini merepresentasikan cara baru dalam pengelolaan pengadaan yang menuntut ketepatan, responsivitas, dan pemahaman teknis dari seluruh pihak yang terlibat, termasuk para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi mitra penyedia pemerintah. Di sinilah tantangan nyata mulai muncul.

Banyak UMKM yang belum sepenuhnya siap dalam hal literasi digital, administrasi daring, maupun pemahaman terhadap regulasi digitalisasi pengadaan. (Rahayu & Sri Murtinah, 2022) Ketidaksiapan ini tidak hanya berdampak pada kelancaran transaksi, tetapi juga pada keberlangsungan partisipasi pelaku usaha dalam pasar pengadaan pemerintah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa transformasi digital tidak bisa berjalan optimal tanpa diiringi oleh pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang terlibat di dalamnya. Penelitian oleh (PUTRI et al., 2019) yang berjudul "Penerapan SIAP dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik untuk Mewujudkan Good Governance di Pemerintah Kabupaten Buleleng" menunjukkan bahwa implementasi sistem informasi aplikasi pengadaan (SIAP) mampu meningkatkan transparansi, efisiensi, serta akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan. Namun, penelitian tersebut juga menyoroti tantangan dalam hal kesiapan SDM dan keterbatasan fitur sistem sebagai kendala utama dalam proses implementasi. Strategi yang dilakukan meliputi pelatihan rutin dan perbaikan sistem. Penelitian ini memperkuat urgensi pengembangan sistem informasi yang adaptif dan berbasis kebutuhan pengguna dalam konteks birokrasi modern. Selanjutnya (Ashari, 2019) dalam penelitiannya yang berjudul "Strategi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam Mendukung Efektivitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah", mengemukakan bahwa pengembangan kompetensi SDM menjadi faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas proses pengadaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa tanpa perencanaan strategis terhadap pelatihan dan manajemen kinerja, transformasi sistem pengadaan tidak akan berjalan optimal. Mereka menekankan pentingnya sinergi antara pelatihan berbasis kebutuhan (need-

based training), peningkatan literasi teknologi, serta pembenahan sistem pengawasan internal sebagai bentuk dukungan terhadap tata kelola pengadaan yang baik.

Penggunaan aplikasi Sempel menuntut SDM yang tidak hanya memahami aspek teknis dari platform, tetapi juga memiliki kemampuan adaptasi terhadap prosedur formal yang berubah, tata kelola digital, serta budaya kerja berbasis teknologi. Di sinilah pentingnya strategi pengembangan SDM tidak hanya untuk internal kementerian, tetapi juga bagi para penyedia barang dan jasa dari sektor swasta, khususnya UMKM. Transformasi digital dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah, khususnya melalui aplikasi Sempel, tidak hanya menuntut perubahan pada aspek teknis atau mekanisme digitalisasi proses administratif. Lebih dari itu, transformasi ini menuntut kesiapan sumber daya manusia (SDM) secara menyeluruh bukan hanya dalam mengoperasikan sistem digital, tetapi juga dalam memahami alur transaksi formal, termasuk proses negosiasi daring, pengisian dokumen, dan pelaporan administratif yang semakin terstruktur dan kompleks (Kristianto, 2022). Bagi pelaku UMKM, seperti CV Bintang Lima, tantangan tersebut terasa semakin nyata karena proses pengadaan melalui aplikasi SIMPeL tidak sekadar menuntut “ikut serta” dalam platform digital, melainkan juga menuntut SDM yang mampu membaca peluang, memahami aturan main birokrasi digital, dan menavigasi proses yang mencakup aspek administratif hingga legalitas usaha.

Proses seperti penyusunan penawaran harga, klarifikasi online, unggah dokumen legalitas, hingga verifikasi transaksi melalui sistem, menjadi bagian dari rutinitas baru yang tidak semua SDM langsung siap hadapi, terlebih bila sebelumnya belum terbiasa dengan proses berbasis teknologi. Oleh karena itu, pengembangan SDM di era digital pengadaan harus mencakup lebih dari sekadar pelatihan teknis aplikasi. Pengembangan yang dilakukan perlu berorientasi pada kemampuan adaptif, kecakapan digital, literasi administratif, dan pemahaman terhadap regulasi yang mendasari proses pengadaan secara keseluruhan. SDM dituntut untuk tidak hanya mampu mengikuti sistem, namun juga mampu memastikan proses berjalan sesuai kaidah hukum, efisien, dan tetap profesional dalam komunikasi bisnis digital. Dengan adanya penggunaan aplikasi SIMPeL yang menunjukkan bahwa Kementerian Keuangan dan instansi lain makin aktif mendorong keterlibatan UMKM sebagai penyedia, sekaligus memperluas implementasi platform *e-procurement* di berbagai lini kerja. Maka, kesiapan SDM dari sisi penyedia menjadi isu strategis yang tidak bisa diabaikan, dan perlu dikaji secara lebih dalam. Pengembangan SDM ke depan harus mencakup integrasi antara keterampilan digital, kompetensi manajerial, dan pemahaman etika birokrasi digital, agar transformasi tidak hanya terjadi secara sistemik, tetapi juga humanis dan berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji terkait strategi pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang diimplementasikan oleh CV Bintang Lima, sebuah entitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berperan sebagai penyedia barang dan jasa dalam lingkup pengadaan pemerintah. Fokus utama penelitian ini adalah pada bagaimana perusahaan tersebut membangun kapasitas dan kompetensi internal SDMnya sebagai respons terhadap implementasi aplikasi SIMPeL (Sistem Informasi Pengadaan Langsung Elektronik) yang diberlakukan oleh Kementerian Keuangan. Aplikasi ini merupakan bagian dari kebijakan nasional dalam mendorong digitalisasi proses pengadaan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks ini, pengembangan SDM tidak hanya diarahkan pada peningkatan keterampilan teknis dalam mengoperasikan sistem digital, tetapi juga mencakup pemahaman prosedural, kemampuan administrasi daring, serta kesiapan mental dan manajerial dalam menghadapi perubahan paradigma birokrasi menuju sistem *e-procurement* yang berbasis teknologi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika adaptasi digital di tingkat UMKM, sekaligus mengidentifikasi

strategi-strategi pengembangan SDM yang efektif dan relevan dengan kebutuhan zaman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (Dr. Abdul Fattah Nasution, 2015) dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena dinilai mampu memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif terhadap fenomena sosial yang bersifat kontekstual dan kompleks, khususnya berkaitan dengan dinamika pengembangan sumber daya manusia (SDM) dalam menghadapi implementasi sistem digital pengadaan barang dan jasa. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini berupaya mengeksplorasi pengalaman, pandangan, dan strategi adaptasi yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam merespons perubahan sistemik yang terjadi akibat digitalisasi proses birokrasi publik. Studi kasus dipilih karena memberikan ruang untuk melakukan eksplorasi mendalam terhadap satu unit analisis secara spesifik, dalam hal ini adalah CV Bintang Lima sebagai pelaku UMKM yang berperan sebagai penyedia barang dan jasa pemerintah melalui sistem Sistem Informasi Pengadaan Langsung Elektronik (SIMPeL) milik Kementerian Keuangan.

Fokus studi diarahkan pada bagaimana CV Bintang Lima mengembangkan strategi peningkatan kapasitas SDM internalnya agar mampu mengikuti prosedur digital yang diterapkan dalam sistem pengadaan, serta menyesuaikan diri dengan tuntutan administratif dan teknis yang menyertainya. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan fakta yang terjadi di lapangan, tetapi juga untuk menganalisis proses berpikir, pola adaptasi, serta hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam menghadapi kebijakan digitalisasi. Dengan demikian, hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual maupun praktis dalam memahami pentingnya penguatan SDM di tengah transformasi digital birokrasi pengadaan pemerintah, terutama pada sektor UMKM yang memiliki keterbatasan dalam sumber daya namun dituntut untuk tetap kompetitif dan responsif terhadap perkembangan teknologi.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam dengan menggunakan panduan wawancara semi-terstruktur. Teknik ini dipilih agar peneliti dapat memperoleh informasi yang kaya dan relevan dari narasumber, sekaligus tetap menjaga fleksibilitas dalam eksplorasi topik yang berkaitan. Panduan wawancara disusun dalam bentuk pertanyaan terbuka yang dirancang untuk menggali pengalaman, persepsi, dan respons dari karyawan CV Bintang Lima terhadap implementasi kebijakan terbaru, khususnya terkait penggunaan aplikasi SIMPeL dalam proses pengadaan barang dan jasa. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai bagaimana kebijakan digitalisasi tersebut memengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi pekerjaan sehari-hari, serta bagaimana para karyawan menyesuaikan diri dengan perubahan sistem kerja dari metode konvensional menuju sistem digital. Fokus utama wawancara mencakup dinamika adaptasi personal, kesiapan kompetensi, tantangan administratif, serta efektivitas pelaksanaan pekerjaan setelah sistem pengadaan dilakukan melalui platform daring. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran utuh mengenai kapasitas dan strategi pengembangan SDM di tengah transformasi digital birokrasi pengadaan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan model analisis yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldana. (Hellen salmon, 2015) Model ini menekankan bahwa analisis data kualitatif bersifat interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sejak awal pengumpulan data hingga tahap penarikan kesimpulan akhir. Proses analisis meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyederhanakan dan memfokuskan data mentah pada aspek yang relevan, sedangkan penyajian data bertujuan untuk menyusun informasi secara sistematis agar memudahkan peneliti dalam memahami pola dan hubungan antar elemen data. Kesimpulan yang ditarik bersifat sementara dan terus diverifikasi melalui teknik validasi

seperti triangulasi. Proses ini dilakukan secara simultan dan berulang untuk memastikan bahwa hasil analisis memiliki validitas yang kuat serta mampu merepresentasikan realitas sosial yang diteliti secara komprehensif.

HASIL PENELITIAN

Profil

CV Bintang Lima merupakan badan usaha berbentuk *Commanditaire Vennootschap* (CV) yang bergerak dalam bidang penyediaan barang dan jasa, dengan fokus utama pada pengadaan untuk kebutuhan instansi pemerintahan. Usaha ini mulai berkembang sejak 2011, dan berbasis di Kota Tangerang (profil perusahaan) serta dikenal aktif sebagai bagian dari pelaku UMKM yang mengambil peran dalam mendukung efisiensi proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Layanan yang disediakan oleh CV Bintang Lima meliputi penyediaan alat tulis kantor (ATK), seragam dinas, alat-alat kebersihan, serta jasa pemasangan seperti instalasi AC dan wallpaper interior. Cakupan layanan yang luas ini menunjukkan kapasitas perusahaan dalam memenuhi kebutuhan logistik dan estetika perkantoran dengan standar pelayanan yang profesional.

Dalam praktiknya, CV Bintang Lima telah beberapa kali terlibat dalam kegiatan pengadaan langsung di berbagai instansi pemerintah pusat, khususnya di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Beberapa proyek pengadaan yang telah dilaksanakan antara lain bekerja sama dengan Sekretariat Pengadilan Pajak Jakarta, Kantor Pajak Jakarta Selatan, serta unit-unit kerja lain di lingkungan Kementerian Keuangan. Kegiatan pengadaan yang dilakukan tidak hanya bersifat pengadaan barang rutin seperti ATK dan alat kebersihan, namun juga mencakup pengadaan jasa yang bersifat teknis seperti pemasangan pendingin ruangan (AC) serta desain interior menggunakan wallpaper. Seiring dengan digitalisasi sistem pengadaan yang dicanangkan oleh pemerintah, CV Bintang Lima mulai mengadopsi penggunaan aplikasi SIMPeL (Sistem Informasi Pengadaan Langsung Elektronik) yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan.

Aplikasi ini digunakan sebagai platform utama dalam proses pengadaan langsung yang lebih transparan, efisien, dan terdokumentasi secara digital. Sebagai penyedia aktif, CV Bintang Lima dihadapkan pada kebutuhan untuk melakukan penyesuaian, terutama dalam hal kesiapan sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan sistem secara mandiri dan profesional. Tidak hanya dituntut untuk memahami prosedur digital dan administratif, tetapi juga untuk menjaga kualitas komunikasi serta integritas data yang dimasukkan ke dalam sistem. Keterlibatan aktif CV Bintang Lima dalam platform SIMPeL mencerminkan upaya serius dalam mengikuti arus transformasi digital di sektor birokrasi, sekaligus menunjukkan peran UMKM dalam mendukung kebijakan efisiensi dan akuntabilitas publik. Penyesuaian ini tidak terlepas dari strategi internal perusahaan, terutama dalam hal pengembangan kompetensi SDM agar tetap mampu bersaing dan memberikan pelayanan optimal di tengah dinamika kebijakan pengadaan pemerintah yang terus berkembang.

Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara informal yang dilakukan dengan beberapa pihak internal dari CV Bintang Lima, ditemukan bahwa proses adaptasi terhadap sistem digital melalui aplikasi SIMPeL membawa pengalaman yang beragam bagi sumber daya manusia di dalam perusahaan. Persepsi awal para karyawan terhadap penggunaan aplikasi SIMPeL didominasi oleh kebingungan dan rasa tidak percaya diri, khususnya pada tahap awal ketika aplikasi tersebut mulai diimplementasikan. Salah satu responden yang merupakan staf administrasi menyampaikan bahwa “awalnya bingung banget harus klik yang mana dulu, takut salah, takut datanya hilang, terus lupa lagi harus apa.” Kondisi ini menjadi semakin menantang bagi karyawan yang memiliki latar usia yang lebih senior atau sebelumnya tidak terbiasa menggunakan teknologi digital dalam pekerjaan sehari-hari. Para

karyawan mengaku membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyesuaikan diri, bahkan harus mencatat ulang alur atau prosedur penggunaan SIMPel secara manual agar tidak lupa. (hasil wawancara)

Di sisi lain, generasi muda dalam struktur organisasi, seperti asisten direktur, memiliki peran yang lebih aktif dalam operasional aplikasi ini. Perbedaan generasi inilah yang menjadi tantangan sekaligus kekuatan dalam proses transisi teknologi digital di tubuh CV Bintang Lima. Kendala lain yang muncul tidak hanya pada aspek teknis seperti pengisian data atau unggah dokumen, tetapi juga pada aspek psikologis dan beban mental. Beberapa staf merasa terbebani karena khawatir akan melakukan kesalahan yang berdampak pada validitas proses pengadaan. Situasi ini menunjukkan bahwa digitalisasi, selain menuntut keterampilan teknis, juga memerlukan kesiapan mental dan fleksibilitas adaptasi yang tidak semua orang miliki secara langsung. Hal ini menjadi catatan penting dalam pengembangan SDM, bahwa pelatihan teknis saja tidak cukup, tetapi juga perlu adanya pendekatan pembelajaran yang manusiawi dan memberdayakan. Namun demikian, sikap para karyawan terhadap perubahan ini secara umum dapat dikatakan positif. Para karyawan menyadari bahwa perubahan ke arah digital adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Salah satu narasumber menyampaikan, “mau nggak mau harus ikut, kan ini sistem baru, zamannya udah beda, jadi kita juga harus ikut jalan.” Ungkapan ini mencerminkan kesadaran kolektif bahwa mengikuti perkembangan zaman merupakan bagian dari profesionalisme, terutama bagi UMKM yang ingin tetap relevan dan dipercaya oleh institusi besar seperti Kementerian Keuangan. Dalam upaya mengatasi tantangan-tantangan tersebut, CV Bintang Lima menerapkan strategi internal yang cukup fleksibel.

Direktur perusahaan lebih banyak mengambil peran pada aspek hubungan eksternal seperti komunikasi dengan pejabat pengadaan atau proses negosiasi. Sementara itu, asisten direktur yang tergolong lebih muda mengambil tanggung jawab operasional aplikasi SIMPel, mulai dari menginput data, mengunggah dokumen, hingga mengelola proses administratif secara daring. Dalam beberapa kasus, seperti ketika terjadi negosiasi harga melalui aplikasi Zoom, asisten inilah yang tampil sebagai representasi perusahaan, sekaligus menegosiasikan kesepakatan harga dengan calon pengguna jasa. Pembagian peran yang terstruktur ini menjadi kunci keberhasilan adaptasi internal.

Selain itu, meskipun tidak dilakukan secara formal, pelatihan terhadap penggunaan SIMPel dilakukan melalui pendekatan praktik langsung (*learning by doing*). Strategi ini dianggap lebih efektif karena sesuai dengan ritme kerja yang dinamis dan real-time. Dengan cara ini, staf dapat langsung memahami konteks penggunaan sistem dalam situasi nyata, daripada hanya menerima materi teoritis yang bersifat umum. Suasana kerja kolaboratif yang tercipta antara direktur dan staf muda juga mempercepat proses transfer pengetahuan, menciptakan sinergi antar generasi, dan memperkuat kesiapan kolektif menghadapi digitalisasi sistem.

Secara keseluruhan, proses adaptasi CV Bintang Lima terhadap aplikasi SIMPel menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital dalam sektor UMKM tidak hanya bergantung pada ketersediaan teknologi, tetapi juga pada strategi pengembangan SDM yang bersifat kontekstual dan fleksibel. Nilai kolaborasi, kemauan untuk belajar, dan pembagian peran yang tepat menjadi fondasi utama dalam mengatasi kendala dan memanfaatkan peluang dari sistem digital yang kini menjadi standar dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Dampak Penggunaan Aplikasi SIMPel Terhadap Efektivitas Kerja

Implementasi aplikasi SIMPel dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan CV Bintang Lima memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap efektivitas kerja, khususnya dalam aspek efisiensi waktu, biaya, serta kejelasan alur kerja. Dari hasil wawancara dengan pihak internal perusahaan, ditemukan bahwa digitalisasi melalui SIMPel secara umum telah membantu

mempercepat proses administrasi dan memperjelas tahapan-tahapan dalam prosedur pengadaan. Ketika penyedia mampu mempersiapkan dokumen dengan baik dan mengikuti alur yang telah ditentukan, maka proses pengadaan dapat berjalan dengan lancar. Namun, apabila kesiapan tersebut tidak optimal, perusahaan tetap memiliki peluang untuk memperoleh pekerjaan lain karena jalinan relasi dengan klien sudah terbentuk sebelumnya.

Efisiensi juga terlihat dari beberapa kasus di mana proses pemesanan barang oleh pihak klien dilakukan melalui komunikasi informal seperti WhatsApp. Hal ini terjadi karena pihak klien telah merasa nyaman dengan gaya kerja dan responsivitas tim CV Bintang Lima. Meskipun komunikasi awal dilakukan secara non-formal, seluruh proses tetap diarahkan dan diselesaikan melalui aplikasi SIMPel untuk menjaga kelengkapan administrasi sesuai prosedur resmi. Pola kerja ini menunjukkan bahwa fleksibilitas tetap dapat dijaga selama seluruh proses akhir memenuhi ketentuan yang berlaku. Tingkat adaptasi SDM terhadap sistem digital juga tergolong baik. CV Bintang Lima menunjukkan komitmen untuk terus membangun komunikasi yang aktif dan terbuka dengan pihak pengguna jasa, termasuk dalam hal meminta arahan teknis terkait penggunaan aplikasi. Karyawan dituntut untuk tidak pasif dalam menghadapi tantangan teknis, melainkan aktif bertanya dan belajar dari pengalaman lapangan. Sikap ini menunjukkan adanya peningkatan kapasitas adaptif SDM yang berorientasi pada solusi serta kesediaan untuk tumbuh bersama dengan perubahan sistem. Dengan pendekatan kolaboratif dan kemauan belajar yang tinggi, aplikasi SIMPel bukan hanya dipandang sebagai sistem administratif, tetapi juga sebagai media kerja yang mampu mendukung kelancaran dan profesionalitas dalam proses pengadaan.

Dalam konteks CV Bintang Lima sebagai pelaku UMKM yang terlibat langsung dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengembangan sumber daya manusia (SDM) menjadi aspek sentral dalam upaya adaptasi terhadap implementasi sistem digital seperti SIMPeL. Pengembangan SDM di perusahaan ini tidak dilakukan secara formal institusional, namun muncul melalui strategi internal yang bersifat kontekstual dan berbasis kebutuhan lapangan. Salah satu bentuk pengembangan yang dominan adalah pembelajaran berbasis praktik langsung (*learning by doing*), di mana anggota tim diposisikan untuk belajar secara aktif melalui keterlibatan langsung dalam proses pengadaan elektronik. Strategi lain yang cukup menonjol adalah pembagian peran berbasis generasi, di mana generasi muda yang lebih familiar dengan teknologi diberi tanggung jawab pada aspek operasional digital, sementara generasi senior berfokus pada strategi dan komunikasi eksternal. Pola kolaborasi lintas generasi ini menciptakan alur kerja yang seimbang sekaligus memperkuat proses transfer pengetahuan internal. Meskipun perusahaan tidak memiliki sistem pelatihan formal, pendekatan ini terbukti mampu meningkatkan kompetensi SDM secara bertahap, khususnya dalam penggunaan aplikasi SIMPeL dan pengelolaan dokumen digital. Pengembangan SDM dalam konteks ini juga didorong oleh kebutuhan akan fleksibilitas, efisiensi, dan kecepatan kerja dalam memenuhi persyaratan administratif pengadaan elektronik. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan oleh CV Bintang Lima mencerminkan karakteristik UMKM yang mengutamakan adaptasi praktis, pengambilan keputusan cepat, dan pembelajaran organik dibandingkan sistem pelatihan yang baku. Meskipun tidak sistematis secara kelembagaan, pola pengembangan SDM yang dilakukan menunjukkan respons positif terhadap tantangan birokrasi digital, dan menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan perusahaan dalam mengikuti sistem pengadaan pemerintah yang berbasis teknologi.

Teori pengembangan sumber daya manusia menekankan pentingnya peningkatan kapabilitas individu sebagai upaya strategis untuk mencapai tujuan organisasi, khususnya dalam menghadapi dinamika perubahan yang bersifat struktural maupun teknologi. (Garavan et al., 1995) mengemukakan bahwa pengembangan SDM tidak hanya terbatas pada pelatihan teknis semata, melainkan mencakup pula pembentukan sikap, penguatan keterampilan interpersonal,

serta peningkatan kapasitas adaptif terhadap perubahan lingkungan kerja. Dalam konteks implementasi aplikasi SIMPel (Sistem Informasi Pengadaan Langsung Elektronik), teori ini memberikan kerangka pemahaman mengenai pentingnya membekali SDM, terutama di sektor UMKM seperti CV Bintang Lima, dengan kompetensi yang relevan untuk mengoperasikan sistem digital secara optimal.

Secara praktis, strategi pengembangan SDM di CV Bintang Lima tidak hanya diterapkan melalui pelatihan formal, tetapi juga melalui pendekatan berbasis pengalaman langsung di lapangan. Karyawan terlibat aktif dalam proses kerja secara kolaboratif bersama pimpinan, termasuk dalam hal penggunaan aplikasi SIMPel. Pendekatan ini memungkinkan terjadinya pembelajaran kontekstual, di mana proses penguasaan teknologi tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi juga dilatih melalui praktik nyata yang dilakukan secara simultan dan berkelanjutan. Dengan demikian, pengembangan SDM di perusahaan ini berjalan secara organik dan fungsional, sejalan dengan prinsip *learning by doing* dalam menghadapi tuntutan digitalisasi sistem pengadaan.

Teori Efektivitas Kerja Efektivitas kerja merupakan indikator penting dalam menilai sejauh mana individu maupun organisasi mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara optimal, dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien. (Jamal, 2014) menyatakan bahwa efektivitas tidak hanya berkaitan dengan pencapaian hasil, tetapi juga melibatkan efisiensi waktu, kejelasan struktur kerja, serta kemampuan dalam mengelola proses kerja agar selaras dengan target yang diharapkan. Dalam era digitalisasi, terutama pada konteks administrasi pengadaan, efektivitas dapat dicerminkan melalui percepatan alur kerja, penurunan tingkat kesalahan administratif, serta meningkatnya kepuasan pengguna layanan, baik dari sisi internal organisasi maupun pihak eksternal seperti mitra atau klien. Implementasi konsep efektivitas kerja pada CV Bintang Lima tercermin dalam pola kerja yang terorganisir dan berbasis peran (*task-oriented*). Pembagian tugas dilakukan secara proporsional sesuai dengan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) masing-masing individu dalam tim. Direktur perusahaan, misalnya, berperan aktif dalam menjalin komunikasi dan negosiasi langsung dengan instansi pemerintah selaku pemberi kerja, guna memastikan kelancaran kerja sama dan pengadaan. Sementara itu, asisten direktur bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen administratif dan pengoperasian sistem digital seperti aplikasi SIMPel.

Kolaborasi yang terjalin antara berbagai elemen internal tersebut menunjukkan adanya efektivitas kerja yang tidak hanya didasarkan pada hasil, tetapi juga pada proses dan sinergi antaranggota tim. Dengan pendekatan ini, CV Bintang Lima mampu membangun kultur kerja yang adaptif dan responsif terhadap perubahan sistem, serta mendorong terciptanya proses kerja yang terukur, efisien, dan profesional. Hal ini sejalan dengan prinsip efektivitas kerja dalam manajemen modern, di mana kolaborasi tim, kapabilitas adaptif, dan pembagian peran yang jelas menjadi fondasi utama dalam mendukung keberhasilan organisasi, khususnya dalam menghadapi tantangan digitalisasi sektor publik.

Teori Good Governance

Good governance, atau tata kelola pemerintahan yang baik, merupakan prinsip normatif yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan partisipasi dalam seluruh proses penyelenggaraan administrasi publik. United Nations Development Programme (UNDP, 1997) merumuskan delapan karakteristik utama dari *good governance*, yaitu: partisipasi masyarakat, penegakan hukum, transparansi, daya tanggap (*responsiveness*), orientasi konsensus, keadilan (*equity*), efektivitas dan efisiensi, serta akuntabilitas. Prinsip-prinsip tersebut dirancang untuk memastikan bahwa kebijakan publik berjalan secara adil, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam jangka panjang. Dalam konteks pengadaan barang dan jasa pemerintah, implementasi prinsip *good governance* menjadi sangat krusial guna membangun

sistem birokrasi yang bersih dan profesional. Penggunaan aplikasi SIMPel (Sistem Informasi Pengadaan Langsung Elektronik) oleh Kementerian Keuangan dapat dilihat sebagai manifestasi konkret dari penerapan prinsip-prinsip tersebut, khususnya dalam aspek transparansi dan akuntabilitas. Melalui digitalisasi proses pengadaan, setiap tahapan pengajuan, seleksi, dan pelaksanaan dapat ditelusuri secara sistematis, meminimalkan potensi manipulasi data atau intervensi pihak ketiga.

Bagi pelaku usaha penyedia, seperti CV Bintang Lima, kemampuan beradaptasi terhadap sistem digital ini menunjukkan pemahaman terhadap pentingnya tata kelola yang baik dalam menjalin kerja sama dengan lembaga publik. Dalam praktiknya, CV Bintang Lima mendukung prinsip good governance melalui keterlibatan aktif dalam sistem digital pengadaan, partisipasi dalam alur komunikasi formal, serta konsistensi dalam pemenuhan dokumen administratif sesuai ketentuan. Kolaborasi yang terbangun melalui penggunaan SIMPel tidak hanya meningkatkan efisiensi internal perusahaan, tetapi juga memperkuat posisi pelaku usaha sebagai mitra kerja yang profesional dan sesuai standar akuntabilitas pemerintahan modern.

PEMBAHASAN

Implementasi aplikasi Sistem Informasi Pengadaan Langsung Elektronik (SIMPel) dalam proses pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah, khususnya di bawah naungan Kementerian Keuangan, telah membawa perubahan mendasar dalam pola kerja yang sebelumnya bersifat konvensional menjadi serba digital. Transformasi ini sejalan dengan agenda nasional dalam mendukung efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam birokrasi pengadaan. Perubahan sistem ini menuntut semua pihak, termasuk para penyedia barang dan jasa dari kalangan UMKM, untuk menyesuaikan diri dan meningkatkan literasi digital bagi para karyawan secara berkelanjutan. CV Bintang Lima, sebagai salah satu penyedia aktif dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan instansi pemerintah, termasuk di Kementerian Keuangan, Pengadilan Pajak Jakarta, dan Kantor Pajak Jakarta Selatan, menunjukkan respons yang cukup progresif terhadap perubahan ini.

Meskipun di awal pelaksanaan terdapat tantangan adaptasi, terutama bagi SDM yang belum terbiasa dengan sistem elektronik, pihak internal CV Bintang Lima secara bertahap mulai membangun sistem kerja berbasis kolaborasi dan praktik langsung. Pembagian peran antara direktur dan asisten direktur menjadi salah satu strategi internal yang mempermudah proses adaptasi, di mana direktur lebih fokus pada komunikasi eksternal dan lobi ke instansi, sementara asistennya menangani aspek teknis dan digital dari proses pengadaan. Secara empiris, hasil dari partisipasi CV Bintang Lima dalam berbagai kegiatan pengadaan telah menunjukkan hasil yang memuaskan. Beberapa klien menyampaikan apresiasi terhadap kinerja penyedia ini, terbukti dengan terjadinya beberapa kali pengadaan yang dilakukan secara langsung (non-lelang) dengan pendekatan informal seperti komunikasi awal via WhatsApp. Meskipun transaksi tetap harus dicatat dan diproses secara resmi melalui aplikasi SIMPeL, kepercayaan yang terbentuk antara instansi pengguna dan CV Bintang Lima mencerminkan efektivitas relasi profesional yang dibangun berdasarkan konsistensi dan kemampuan beradaptasi. Fenomena ini menunjukkan bahwa digitalisasi pengadaan tidak menjadi hambatan signifikan bagi pelaku usaha kecil-menengah apabila disertai dengan komitmen untuk belajar, keterbukaan terhadap perubahan, dan sistem kerja tim yang adaptif.

Dengan pendekatan kerja kolaboratif dan partisipatif, CV Bintang Lima secara praktis telah menerapkan prinsip good governance dan memperlihatkan efektivitas kerja dalam sistem digital. Temuan ini mengindikasikan bahwa strategi pengembangan SDM melalui pendekatan praktis dan pembelajaran bersama secara informal dapat menjadi model yang relevan untuk diterapkan dalam

konteks UMKM lainnya yang menghadapi tantangan serupa dalam era digitalisasi birokrasi.

KESIMPULAN

Transformasi digital dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang diwujudkan melalui implementasi aplikasi SIMPeL (Sistem Informasi Pengadaan Langsung Elektronik) telah menjadi langkah strategis dalam membangun sistem birokrasi yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, keberhasilan implementasi sistem ini tidak hanya bertumpu pada aspek teknologi, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang terlibat, terutama dari kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai penyedia layanan. Hasil penelitian terhadap CV Bintang Lima sebagai salah satu UMKM yang aktif dalam proses pengadaan pemerintah menunjukkan bahwa adaptasi terhadap sistem digital membawa tantangan yang cukup kompleks, terutama dalam hal literasi digital, pemahaman alur administratif, serta kecakapan teknis dalam mengoperasikan sistem. Meskipun demikian, perusahaan mampu menunjukkan respons positif melalui pendekatan pengembangan SDM berbasis praktik langsung (*learning by doing*), pembagian peran yang strategis antar generasi dalam organisasi, serta kolaborasi internal yang solid. Strategi ini terbukti efektif dalam mempercepat proses adaptasi sekaligus menjaga efektivitas kerja di tengah perubahan sistemik. Penerapan aplikasi SIMPeL tidak hanya meningkatkan efisiensi waktu dan kejelasan alur kerja, tetapi juga memperkuat profesionalisme dan akuntabilitas CV Bintang Lima dalam menjalin kerja sama dengan instansi pemerintah.

Kepercayaan yang terbangun antara penyedia dan klien, ditunjukkan dengan komunikasi informal yang tetap diarahkan pada prosedur formal digital, menjadi indikator keberhasilan adaptasi organisasi terhadap sistem e-procurement. Secara teoritis, hasil temuan ini mendukung pandangan Garavan et al. (1995) tentang pentingnya pengembangan kapabilitas adaptif dalam SDM, sejalan pula dengan prinsip efektivitas kerja menurut Robbins dan Jamal, serta memperkuat relevansi prinsip good governance dari UNDP dalam konteks tata kelola digital yang partisipatif dan akuntabel. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa strategi pengembangan SDM yang fleksibel, partisipatif, dan kontekstual menjadi faktor kunci dalam keberhasilan UMKM menghadapi tantangan digitalisasi pengadaan. Temuan ini memberikan implikasi penting bagi pemerintah maupun pelaku UMKM lainnya, bahwa keberhasilan transformasi digital birokrasi tidak hanya memerlukan sistem yang baik, tetapi juga manusia yang siap berubah dan mampu belajar secara aktif di dalamnya.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar pelaku UMKM yang bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat lebih proaktif dalam mengembangkan kapasitas sumber daya manusia, terutama dalam hal literasi digital, administrasi daring, dan pemahaman regulasi e-procurement. Pendekatan pembelajaran berbasis praktik langsung, pembagian peran yang adaptif, serta komunikasi internal yang kolaboratif terbukti menjadi strategi efektif dalam menghadapi tantangan digitalisasi sistem pengadaan seperti SIMPeL. Untuk penelitian selanjutnya, kajian dapat diperluas dengan membandingkan strategi adaptasi beberapa UMKM dari latar belakang dan skala usaha yang berbeda, guna memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh terkait kesiapan sektor UMKM dalam menghadapi transformasi digital birokrasi pengadaan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashari, H. (2019). ANALISIS PENERIMAAN PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGADAAN LANGSUNG (SIMPeL) PADA KEMENTERIAN KEUANGAN. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik*, 22(1), 79. <https://doi.org/10.31845/jwk.v22i1.136>
- Dr. Abdul Fattah Nasution, M. P. (2015). Metode Penelitian Kualitatif. In *Etika Jurnalisme Pada Koran Kuning : Sebuah Studi Mengenai Koran Lampu Hijau* (Vol. 16, Issue 2).
- Garavan, T. N., Costine, P., & Heraty, N. (1995). The emergence of strategic human resource development. *Journal of European Industrial Training*, 19(10), 4-10. <https://doi.org/10.1108/03090599510095816>
- Hellen salmon. (2015). Qualitative data analysis: a methods sourcebook / Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, Johnny Saldaña, Arizona State University. In *Etika Jurnalisme Pada Koran Kuning : Sebuah Studi Mengenai Koran Lampu Hijau* (Vol. 16, Issue 2).
- Humairo Amriza, P., & Suhartati, T. (2022). Analisis Pencapaian Good Governance pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung (SIMPeL) di Politeknik Negeri Jakarta. *Prosiding SNAM PNJ*. <https://sirup.lkpp.go.id>
- Jamal, A.-H. (2014). Leadership Styles and Value Systems of School Principals. *American Journal of Educational Research*, 2(12), 1267-1276. <https://doi.org/10.12691/education-2-12-22>
- Kristianto, A. (2022). Negosiasi Harga e-Purchasing Katalog Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Jurnal Pengadaan Barang/Jasa*, 1(1), 53-60. <https://doi.org/10.55961/jpbj.v1i1.14>
- PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA. (2021). Perubahan Atas Peraturan Menteri! Keuangan Nomor 77 /Pmk.01/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024. *Situs Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.*, 1-20. www.jdih.kemenkeu.go.id
- PUTRI, P., SATRIAWAN, G. M. I., UTAMI, I. G. A. M. P. U., PUTRI, I. G. A. P., & PRIYANTO, K. I. D. (2019). Penerapan Siap Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik Untuk Mewujudkan Good Governance Di Pemerintah Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 8(3), 213-223. <https://doi.org/10.23887/jinah.v8i3.20028>
- Rahayu, R., & Sri Murtinah, T. (2022). Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Di Unit Layanan Pengadaan Biro Umum, Sekretariat Presiden. *Journal of Business Administration Economic & Entrepreneurship*, 4(2), 57-57.